

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota dan melaksanakan urusan wajib dan pilihan diperlukan sumber pendanaan, baik dari pendapatan asli daerah, dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Sumber pendanaan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan hasil audit dapat dilihat dari kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Periode kinerja keuangan Kota Banjarbaru disajikan untuk periode tahun 2011-2015. Data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kota Banjarbaru terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari :

A. Komponen Pendapatan :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, BPHTB (mulai tahun 2010) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Komponen Belanja :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Ringkasan perubahan APBD Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perkembangan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015

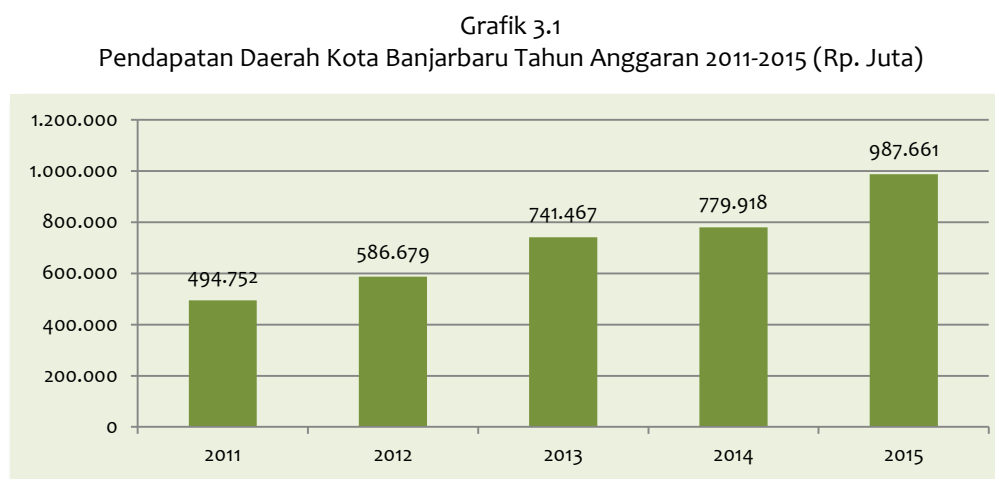
NO.	NAMA REKENING	2011	2012	2013	2014	2015
	PENDAPATAN	494.752.309.570,00	586.679.370.002,00	741.467.564.350,00	779.918.815.970,00	987.661.990.410,00
	Pendapatan Asli Daerah	38.495.603.390,00	45.113.076.930,00	65.732.025.030,00	93.573.552.710,00	140.465.962.510,00
1.	Hasil Pajak Daerah	16.396.519.400,00	19.280.955.040,00	30.697.252.560,00	45.266.244.400,00	67.360.823.038,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	15.088.549.720,00	8.410.817.500,00	9.954.717.500,00	11.343.164.250,00	11.242.702.500,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.699.467.495,00	2.288.757.890,00	2.561.207.675,00	3.917.328.445,00	8.242.786.972,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.311.066.775,00	15.132.546.500,00	22.518.847.295,00	33.046.815.615,00	53.619.650.000,00
	Dana Perimbangan	338.652.220.000,00	420.862.216.032,00	527.329.029.645,00	530.723.583.260,00	653.763.441.000,00
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71.074.250.000,00	85.315.772.032,00	128.831.459.645,00	92.937.455.260,00	142.363.273.000,00
2.	Dana Alokasi Umum	242.193.670.000,00	308.618.984.000,00	358.995.070.000,00	389.107.868.000,00	393.734.908.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	25.384.300.000,00	26.927.460.000,00	39.502.500.000,00	48.678.260.000,00	117.665.260.000,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	117.604.486.180,00	120.704.077.040,00	148.406.509.675,00	155.621.680.000,00	193.432.586.900,00
1.	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	-	-	-	1.105.899.900,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	37.390.569.645,00	74.755.278.040,00	85.564.000.000,00	80.564.000.000,00	96.620.400.000,00
3.	Dana Penyesuaian	76.913.916.535,00	43.948.799.000,00	56.542.509.675,00	75.057.680.000,00	72.706.287.000,00
4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.300.000.000,00	2.000.000.000,00	6.300.000.000,00	-	23.000.000.000,00
	BELANJA	536.450.010.495,00	636.396.347.150,00	783.712.873.340,00	944.932.934.274,00	1.285.980.999.919,09
	Belanja Tidak Langsung	263.729.310.495,00	316.992.084.400,00	336.230.674.815,00	367.109.835.260,00	420.531.329.820,00
1.	Belanja Pegawai	243.880.279.715,00	292.941.131.539,00	315.188.694.335,00	351.523.803.780,00	389.916.037.315,00
2.	Belanja Hibah	8.928.564.780,00	5.289.950.861,00	10.425.315.000,00	6.221.250.000,00	25.218.034.200,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	9.420.466.000,00	11.129.690.000,00	9.116.665.480,00	7.106.473.680,00	3.647.466.105,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	0,00	758.307.800,00	1.129.756.200,00
5.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	7.631.312.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	620.036.000,00
	Belanja Langsung	272.720.700.000,00	319.404.262.750,00	447.482.198.525,00	577.823.099.014,00	865.449.670.099,09
1.	Belanja Pegawai	33.514.392.000,00	27.935.399.600,00	33.091.210.000,00	32.819.760.476,00	39.599.098.160,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	101.457.428.144,00	132.454.024.825,00	164.167.752.377,00	198.737.716.338,00	264.434.912.850,00
3.	Belanja Modal	137.748.879.856,00	159.014.838.325,00	250.223.236.148,00	346.265.622.200,00	561.415.659.089,09
	SURPLUS/(DIFISIT)	(41.697.700.925,00)	(49.716.977.148,00)	(42.245.308.990,00)	(165.014.118.304,00)	(298.319.009.509,09)
	PEMBIAYAAN	41.697.700.925,00	49.716.977.148,00	42.245.308.990,00	165.014.118.304,00	298.319.009.509,09
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.197.700.925,00	108.235.194.348,00	185.245.308.990,00	195.314.118.304,00	316.919.009.509,09
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	47.147.700.922,00	108.235.194.348,00	185.245.308.990,00	147.683.879.984,00	134.669.761.680,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	47.630.238.320,00	0,00
3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.500.000.000,00	58.518.217.200,00	143.000.000.000,00	30.300.000.000,00	18.600.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	50.000.000.000,00	113.000.000.000,00	19.300.000.000,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	8.500.000.000,00	30.000.000.000,00	11.000.000.000,00	18.600.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	18.217.200,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata pendapatan daerah naik sebesar Rp. 718.095 juta per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 19,20%. Berdasarkan pencermatan terhadap pendapatan daerah, proporsi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Banjarbaru selama tahun anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Proporsi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Pendapatan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	7,78	7,69	8,87	12,00	14,22
Dana Perimbangan	68,45	71,74	71,12	68,05	66,19
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23,77	20,57	20,02	19,95	19,58
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

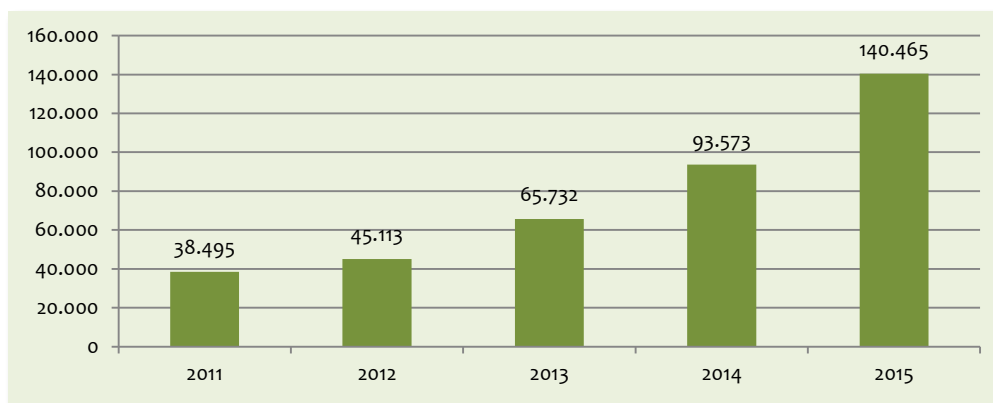
Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah semakin besar, walaupun secara rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total

pendapatan masih menunjukkan ketergantungan Kota Banjarbaru terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun terus meningkat selama tahun anggaran 2011-2015, hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 76.676 juta per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,84%. Berdasarkan pemerhatian terhadap pendapatan asli daerah, proporsi komponen pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.3
Persentase Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Pendapatan Asli Daerah	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Hasil Pajak Daerah	42,59	42,74	46,70	48,38	47,96
Hasil Retribusi Daerah	39,20	18,64	15,14	12,12	8,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,41	5,07	3,90	4,19	5,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13,80	33,54	34,26	35,32	38,17
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

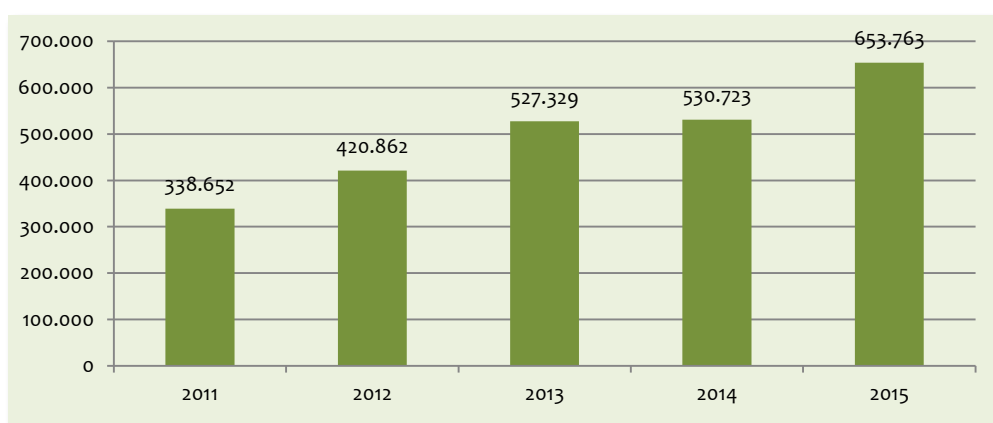
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi hasil pajak daerah merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun terus meningkat selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Hal ini dapat dilihat dari Dana Perimbangan tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.3
Perkembangan Dana Perimbangan Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata Dana Perimbangan sebesar Rp 494.265 juta per tahun atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,35%. Berdasarkan pencermatan terhadap dana perimbangan, proporsi komponen dana perimbangan Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.4
Persentase Proporsi Komponen Dana Perimbangan Terhadap
Total Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Dana Perimbangan	Proporsi Terhadap Total Dana Perimbangan (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20,99	20,27	24,43	17,51	21,78
Dana Alokasi Umum	71,52	73,33	68,08	73,32	60,22
Dana Alokasi Khusus	7,50	6,40	7,49	9,17	18,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

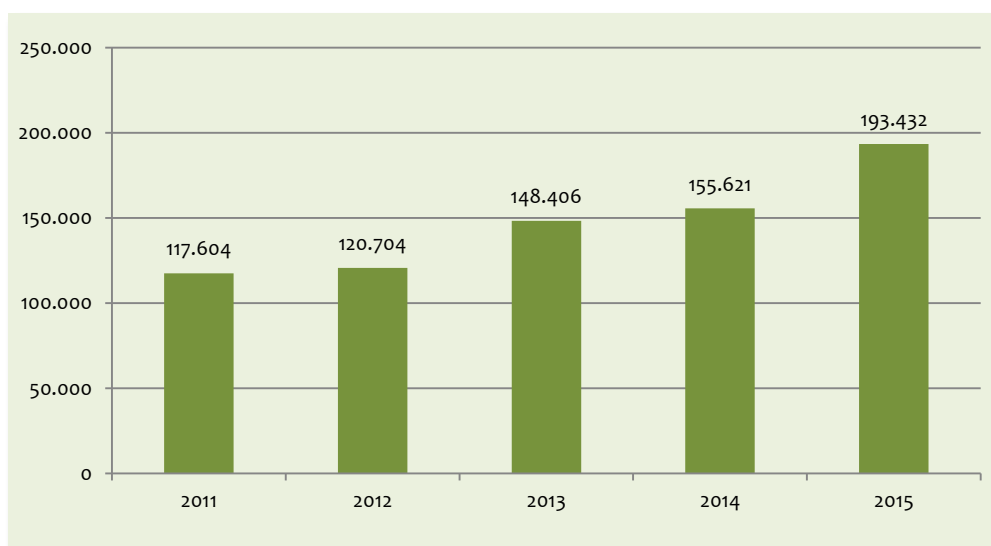
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara proporsi Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan.

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (c) Dana Penyesuaian, (d) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun cenderung meningkat selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Hal ini dapat dilihat dari Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.4
Perkembangan Lain-lain pendapatan yang sah Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 147.153 juta per tahun atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,69%. Berdasarkan pencermatan terhadap Lain-lain pendapatan yang sah, proporsi komponen Lain-lain pendapatan yang sah Kota Banjarbaru selama tahun anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.5
Persentase Proporsi Komponen Lain-lain pendapatan yang sah Terhadap
Total Lain-lain pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Lain-lain pendapatan yang sah	Proporsi Terhadap Total Lain-lain pendapatan yang sah (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Hibah	1,70	0	0	0	0,57
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31,79	61,93	57,66	51,77	49,95
Dana Penyesuaian	65,40	36,41	38,10	48,23	37,59
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,11	1,66	4,25	0	11,89
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

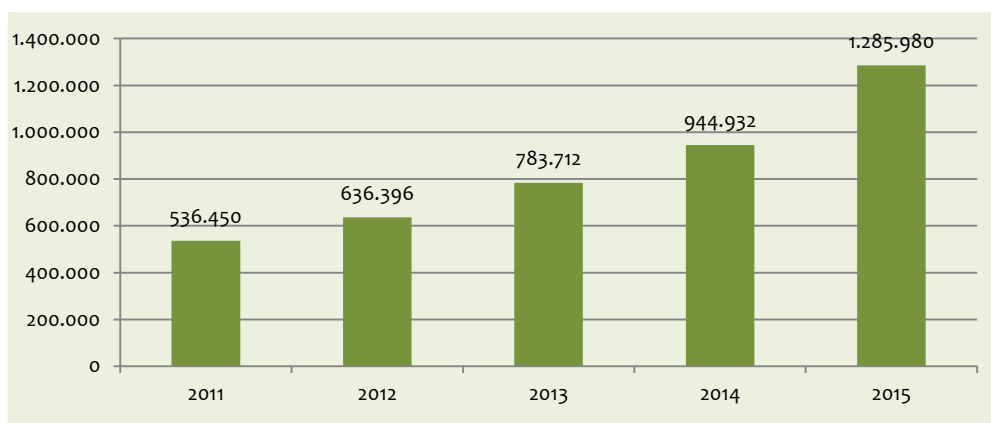
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru, diolah

2. Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Belanja Daerah tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.5
Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, dari rata-rata belanja daerah sebesar Rp 837.494 juta per tahun atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,61%. Berdasarkan pencermatan terhadap belanja daerah, proporsi komponen belanja terhadap total belanja daerah Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Persentase Proporsi Komponen Belanja Terhadap
Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015

Belanja Daerah	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Tidak Langsung	49,16	49,81	42,90	38,85	32,70
Belanja Langsung	50,84	50,19	57,10	61,15	67,30
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

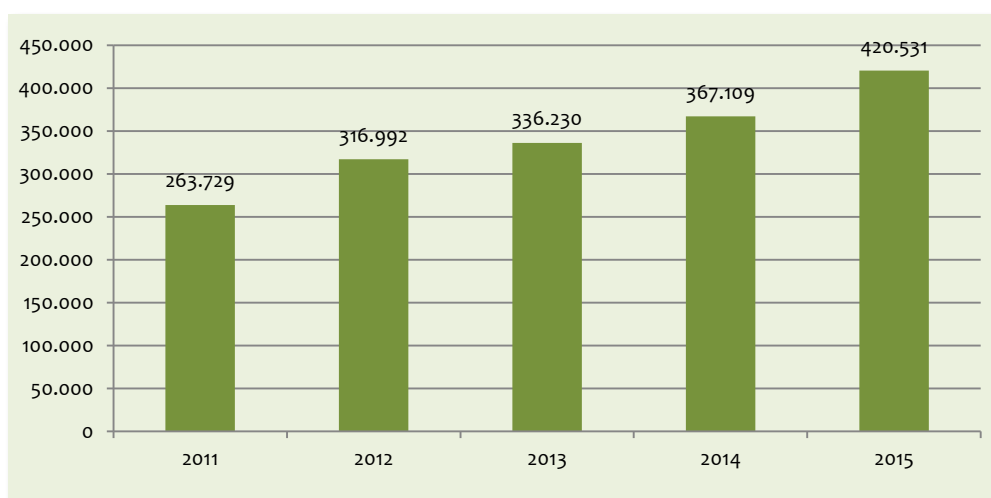
Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk kepentingan publik masih lebih besar dari pada belanja pegawai.

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).

a) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Hibah, (c) Belanja Bantuan Sosial (d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes, dan (e) Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak langsung Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun cenderung meningkat selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Hal ini dapat dilihat dari Belanja tidak langsung tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.6
Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 340.918 juta per tahun atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,50%. Berdasarkan pemerhatian terhadap Belanja Tidak Langsung, proporsi komponen Belanja Tidak Langsung Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.7
Persentase Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap
Total Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Belanja Tidak Langsung	Proporsi Terhadap Total Belanja Tidak Langsung (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Pegawai	92,47	92,41	93,74	95,75	92,72
Belanja Hibah	3,39	1,67	3,10	1,69	6,00
Belanja Bantuan Sosial	3,57	3,51	2,71	1,94	0,87
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,21	0,27
Belanja Tidak Terduga	0,57	2,41	0,45	0,41	0,15
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

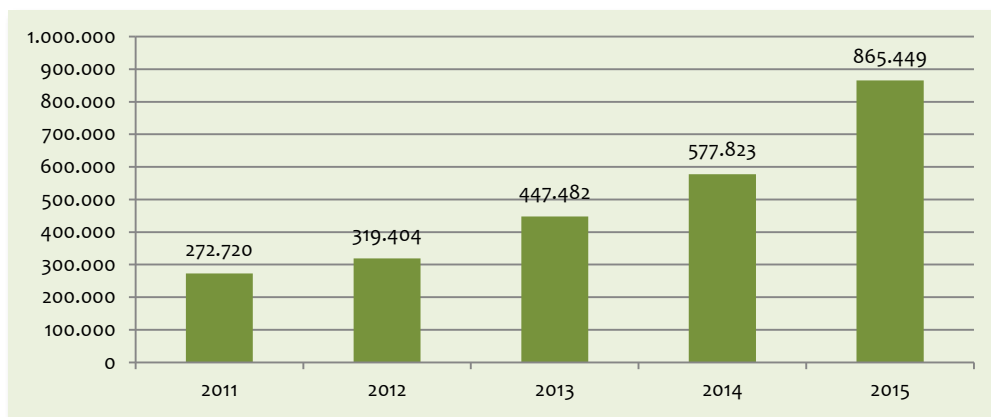
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara proporsi belanja pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja tidak langsung dan terjadi kenaikan setiap tahunnya.

b) Belanja Langsung (BL)

Belanja Langsung terdiri dari : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Belanja Langsung Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Hal ini dapat dilihat dari Belanja langsung tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 3.7
Belanja Langsung Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

Selama tahun anggaran 2011-2015, rata-rata Belanja Langsung sebesar Rp 496.575 juta per tahun atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,03%. Berdasarkan pencermatan terhadap Belanja Langsung, proporsi komponen Belanja Langsung Kota Banjarbaru selama tahun anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada tabel.

Tabel 3.8
Persentase Proporsi Komponen Belanja Langsung Terhadap
Total Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011-2015

Komponen Belanja Langsung	Proporsi Terhadap Total Belanja Langsung (%)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Belanja Pegawai	12,29	8,75	7,39	5,68	4,58
Belanja Barang dan Jasa	37,20	41,47	36,69	34,39	30,55
Belanja Modal	50,51	49,78	55,92	59,93	64,87
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

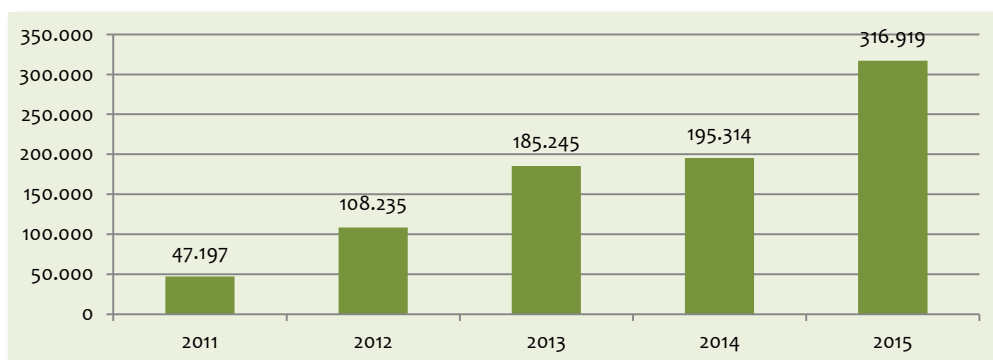
Dari tabel di atas terlihat bahwa secara proporsi belanja modal merupakan komponen terbesar dari belanja langsung dan terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan publik masih merupakan prioritas dalam komponen belanja langsung.

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Pencairan Dana Cadangan, dan (c) Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, Hal ini dapat dilihat dari Penerimaan Pembiayaan tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.

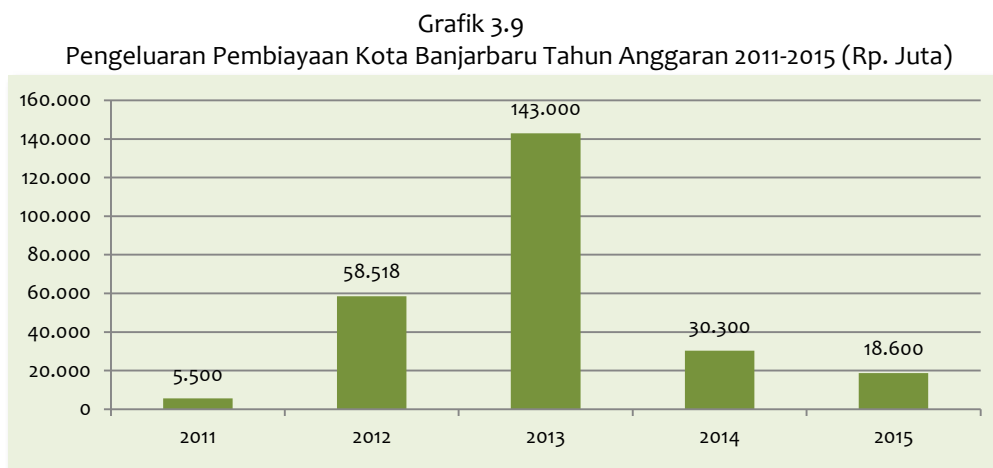
Grafik 3.8
Penerimaan Pembiayaan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011-2015 (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Pembentukan Dana Cadangan, dan (b) Penyertaan Modal (Investasi). Pengeluaran Pembiayaan Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun berfluktuatif, hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Pembiayaan tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana grafik dibawah ini.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2015

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit terhadap APBD tahun 2011-2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan hasil audit APBD tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2011-2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2011-2015, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

4. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain :

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Banjarbaru yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
6. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan dan belanja selama lima tahun. Proyeksi pendapatan dan belanja ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan penghitungan, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,090 trilyun dan meningkat menjadi Rp 1,144 trilyun pada tahun 2021 sedangkan proyeksi belanja pada tahun 2016 sebesar Rp 1,281 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2021 sebesar Rp 1,242 trilyun.

Proyeksi pendapatan dan belanja ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Adapun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

No.	URAIAN	Rata-rata Pertumbuhan (%)	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	PENDAPATAN	1,14	1.090.828.469.680,00	979.405.441.833,00	990.166.525.835,00	1.050.493.186.865,00	1.097.789.176.065,00	1.144.395.770.150,00
1.	Pendapatan Asli Daerah	6,58	165.000.000.000,00	214.553.083.193,00	188.250.000.000,00	201.500.000.000,00	210.800.261.730,00	218.091.299.250,00
	Hasil Pajak Daerah	8,85	80.400.628.264,00	95.014.664.612,00	104.165.274.440,00	112.688.245.815,00	118.515.250.750,00	122.154.887.825,00
	Hasil Retribusi Daerah	4,19	11.263.410.000,00	10.829.510.000,00	10.972.510.000,00	12.775.050.000,00	13.206.838.630,00	13.695.112.175,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,25	6.415.433.070,00	6.687.641.743,00	6.687.641.745,00	6.955.147.415,00	7.233.353.310,00	7.522.687.450,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,91	66.920.528.666,00	102.021.266.838,00	66.424.573.815,00	69.081.556.770,00	71.844.819.040,00	74.718.611.800,00
2.	Dana Perimbangan	-0,65	839.585.800.390,00	636.247.013.340,00	693.305.388.000,00	721.037.603.520,00	749.879.107.655,00	779.874.271.955,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-0,25	149.734.265.000,00	77.103.264.340,00	104.274.489.000,00	108.445.468.560,00	112.783.287.300,00	117.294.618.790,00
	Dana Alokasi Umum	2,69	422.416.758.390,00	428.542.067.000,00	428.542.067.000,00	445.683.749.680,00	463.511.099.665,00	482.051.543.650,00
	Dana Alokasi Khusus	-3,26	267.434.777.000,00	130.601.682.000,00	160.488.832.000,00	166.908.385.280,00	173.584.720.690,00	180.528.109.515,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13,07	86.242.669.290,00	128.605.345.300,00	108.611.137.835,00	127.955.583.345,00	137.109.806.680,00	146.430.198.945,00
	Pendapatan Hibah	2,40	-	-	25.694.585.535,00	26.722.368.955,00	27.791.263.715,00	28.902.914.260,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	2,40	-	74.166.552.300,00	74.166.552.300,00	77.133.214.390,00	80.218.542.965,00	83.427.284.685,00
	Dana Penyesuaian	18,51	86.242.669.290,00	54.438.793.000,00	8.750.000.000,00	24.100.000.000,00	29.100.000.000,00	34.100.000.000,00
B.	BELANJA	-0,28	1.281.524.004.645,88	1.079.368.342.155,25	1.093.317.152.620,00	1.160.436.981.650,00	1.188.939.802.850,00	1.242.546.396.935,00
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,32	445.722.759.504,88	408.679.529.246,25	424.547.181.665,00	433.292.331.835,00	454.813.711.565,00	473.075.684.065,00
	Belanja Pegawai	1,42	424.786.032.004,88	386.195.356.146,25	404.044.285.665,00	418.042.262.835,00	434.310.815.565,00	452.572.788.065,00
	Belanja Bunga	4,46	-	-	1.252.827.000,00	2.000.000.000,00	1.252.827.000,00	1.252.827.000,00
	Belanja Subsidi	23,74	885.312.000,00	1.879.200.000,00	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Belanja Hibah	0,90	15.128.715.500,00	16.347.968.500,00	13.854.069.000,00	9.854.069.000,00	13.854.069.000,00	13.854.069.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-10,20	2.588.519.638,00	1.455.400.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota Lain	-4,47	1.334.180.362,00	1.277.604.600,00	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00	1.046.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3,60	1.000.000.000,00	1.524.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	BELANJA LANGSUNG	-1,11	835.801.245.141,00	670.688.812.909,00	668.769.970.955,00	727.144.649.815,00	734.126.091.285,00	769.470.712.870,00
	Belanja Pegawai	3,14	45.273.464.000,00	33.469.720.250,00	37.673.033.000,00	38.180.538.000,00	46.381.966.300,00	49.334.500.610,00
	Belanja Barang dan Jasa	2,31	277.341.388.617,00	311.735.491.343,20	268.078.286.770,00	323.196.397.233,00	288.038.576.770,00	298.038.576.770,00
	Belanja Modal	-1,88	513.186.392.524,00	325.483.601.315,80	363.018.651.185,00	365.767.714.582,00	399.705.548.215,00	422.097.635.490,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-9,50	(190.695.534.965,88)	(99.962.900.322,25)	(103.150.626.785,00)	(109.943.794.785,00)	(92.150.626.785,00)	(98.150.626.785,00)
C.	PEMBIAYAAN	-9,50	190.695.534.965,88	99.962.900.322,25	103.150.626.785,00	109.943.794.785,00	92.150.626.785,00	98.150.626.785,00
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-9,52	206.695.575.042,88	118.462.900.722,25	110.650.626.785,00	124.943.794.785,00	103.650.626.785,00	109.650.626.785,00
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	-9,35	203.695.575.042,88	118.462.900.722,25	110.650.626.785,00	124.943.794.785,00	103.650.626.785,00	109.650.626.785,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,57	16.000.040.077,00	18.500.000.400,00	7.500.000.000,00	15.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,57	16.000.040.077,00	18.500.000.400,00	7.500.000.000,00	15.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00

B. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam rangka memenuhi rencana belanja 5 (lima) tahun diperlukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan. Berdasarkan perkiraan pendapatan sebagaimana tersebut diatas dan pola belanja selama 5 (lima) tahun serta memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru (Rp. Milyar)

No.	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Pendapatan	1.090,83	979,41	990,17	1.050,49	1.097,79	1.144,40
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	3,00	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	203,70	118,46	110,65	124,94	103,65	109,65
	Total penerimaan	1.297,52	1.097,87	1.100,82	1.175,44	1.201,44	1.254,05
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	919,74	779,49	755,45	823,75	841,03	872,31
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	377,78	318,38	345,37	351,69	360,41	381,73

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Banjarbaru (Rp. Milyar)

No.	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	377,78	318,38	345,37	351,69	360,41	381,73
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	835,80	670,69	668,77	727,14	734,13	769,47
II.b	Pembentukan dana cadangan	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi:						
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	478,96	374,79	342,65	388,70	393,96	406,99
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	16	19	8	15	12	12
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	343,84	277,40	318,62	323,44	328,66	350,98
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	33,94	40,98	26,75	28,25	31,75	30,75
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	445,72	408,68	424,55	433,29	459,50	477,52
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	424,79	386,20	404,04	418,04	434,31	452,57
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	20,94	22,48	20,50	15,25	25,19	24,94
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	13,00	18,50	6,25	13,00	6,56	5,81

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Banjarbaru, diolah